

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2021



## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN**

Jln. Raya Magetan-Madiun Km.4,5 Telp. 0351 895195 Fax.0351 895195 Magetan  
email : [dispenduk\\_mgt@yahoo.co.id](mailto:dispenduk_mgt@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami menyusun Rankhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Rankhir Rencana Kerja Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan anggaran untuk mendanai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai wujud untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Selain itu Rankhir Rencana Kerja Tahun 2021 disusun untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan akan dilaporkan dalam SAKIP tahun 2021 nanti.

Penyusunan Rankhir Rencana Kerja Tahun 2021 disusun sebagai wujud penjabaran / pelaksanaan dari seluruh target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan periode 2018-2023 sehingga semua isi yang terkandung dalam Rankhir Rencana Kerja mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang akan ditetapkan.

Demikian Rankhir Rencana Kerja Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada periode tahun selanjutnya.

Magetan, 3 Agustus 2020

Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Magetan

**Drs. HERMAWAN, Msi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660320 198602 1 003

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	18
3.3 Program Dan Kegiatan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB V PENUTUP.....	36











# **BAB I P E N D A H U L U A N**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan .

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2021 mengacu pada Rencana Stratejik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMD Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 mengacu pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2021 dan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2021 berisi sasaran kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 berikut indikator – indikator sarasannya. Selain itu juga diuraikan tentang program-program / kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan Program / Kegiatan yang telah dilakukan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magean Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 56);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Menjamin berlanjutnya program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra;

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, dasar hukum penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan tahun 2021 mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2021.

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang program dan rencana kegiatan, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

##### **BAB V. PENUTUP**

Berisi tentang catatan-catatan penting yang dianggap perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tahun 2021 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari periode Renstra 2018-2023. Oleh karena itu, pada sub bab ini hanya akan diuraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan proyeksi capaian pelaksanaan Renja Tahun 2020 untuk mengetahui progress capaian sasaran Renstra tahun 2018-2023.

Review terhadap Monev Renja Tahun Sebelumnya (Tahun 2019) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Review Terhadap Monev Renja Tahun sebelumnya (2019)**  
**(Tribulan 1 s/d IV)**





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Analisis Kinerja Pelayanan Dinas**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ Indikator lain	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur; ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran									
	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur			100%	100%	100%	-			
	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	-			
	Prosentase SKM			80%	85%	84,21%	-			
2.	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi									

NO.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ Indikator lain	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			16 unit	16 unit	137	-			
	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor			15 unit	5 unit	113	-			
	Jumlah pemeliharaan / gedung kantor			3 gedung	1 gedung	100	-			Tahun 2020 yang terealisasi anggaran untuk perencanaan saja
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional			2unit Roda 2	-	100	-			
	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor			12 jenis	10 jenis	100	-			
3.	<b>Prosentase SDM yang berkompeten</b>			-	-	-	-			
	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/ bimtek			31 orang	36 orang	100%	-			Tahun 2020 anggaran didrop adanya rasionalisasi covid-19
4.	<b>Prosentase tenaga outsourcing yang mendapatkan pakaian dinas</b>			-	-	-	-			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam hari-hari tertentu			-	-	-	-			Tahun 2020 anggaran didrop adanya rasionalisasi covid-19
5.	<b>Prosentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</b>			100%	100%	100%				
	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan			100%	100%	100%	-			
7.	<b>Prosentase penyelesaian dokumen kependudukan</b>			99,80%	99,50%	100%				
	Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan			3 jenis	3 jenis	100%	-			

NO.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ Indikator lain	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
	Data arsip administrasi kependudukan			2 dok	-	-				Tahun 2020 anggaran didrop adanya rasionalisasi covid-19
8.	<b>Prosentase penyelesaian dokumen pencatatan sipil</b>			<b>99,80%</b>	<b>99,50%</b>	<b>100%</b>				
	Jumlah pelayanan penerbitan dokumen capil			7 jenis	7 jenis	100%				
	Jumlah data arsip catatan sipil			18.000 dok	16.000 dok	100%				
9.	<b>Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK			12 bulan	12 bulan	100%				
10.	<b>Prosentase ketersediaan data kependudukan dan kerjasama dengan OPD/lintas OPD</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
	Jumlah kerjasama dengan OPD dan lintas OPD; Jumlah monev tertib adminduk kedesa			1 dok; 72 kali	1 dok; 72 kali	100%				Tahun 2020 anggaran didrop adanya rasionalisasi covid-19
	Jumlah buku profil kependudukan yang disusun			280 eks	280 eks	280 eks				
	Jumlah sertifikat Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)			1 jenis	1 jenis	100%				Tahun 2020 upgrade dok ISO

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi utama dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah :

1. Sarana dan prasarana dalam peralatan terutama untuk mesin cetak KTP-el.
2. Ketidak konsisten regulasi Pusat yang berdampak pada daerah.

Kedepan terhadap permasalahan yang ada kami akan melakukan penyesuaian anggaran yang digunakan untuk peningkatan SDM terutama bagi tenaga operasional di pelayanan yaitu Bimtek Administrator Data Base (ADB). Terhadap kelangkaan blanko KTP-el ditahun 2018 sesuai instruksi Dirjendukcapil untuk tahun 2019 ketersediaan blanko telah tercukupi dan untuk cetak PRR dan yang masih pegang surat keterangan (suket) tuntas telah tercetak semua.

Penyusunan rancangan akher Renja tahun 2021 dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal.

#### 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021

Review terhadap ranwal RKPD yakni membandingkan antara Ranwal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

**Tabel 2.4**  
**Review Ranwal RKPD tahun 2021**

NO.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kab Mgt	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur; Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kab Mgt	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur; Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran			
1.	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	200jt	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	200jt	
2.	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran		Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	200 jt	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%	2.100M	Penambahan Tenaga Non PNS di kecamatan karena operator yang

NO.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
											menangani petugas dari dispenduk Untuk mengantisipasi kenaikan UMK, karena semua tenaga non PNS (CS, Operasional Dinas ) tahun 2019 masih dibawah UMK
3.	Survey Kepuasan Masyarakat		Prosentase survey SKM	85	25 jt	Survey Kepuasan Masyarakat		Prosentase survey SKM	85	25 jt	
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>75%</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>			
1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	16 unit	150 jt	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	16 unit	150 jt	
2.	Pengadaan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	18 unit	150 jt	Pengadaan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	18 unit	2.650 M	Untuk memenuhi kebutuhan alat Perekaman, Pencetakan yang ditempatkan di 11 Kecamatan
3.	Rehabilitasi pemeliharaan gedung kantor		Jumlah kegiatan pembangunan/pemeliharaan dan rehab gedung kantor	1 kegiatan	900 jt	Rehabilitasi pemeliharaan gedung kantor		Jumlah kegiatan pembangunan /pemeliharaan dan rehab gedung kantor	1 kegiatan	900 jt	Masih banyak gd yang perlu diperbaiki terutama gd penyimpanan dokumen Adminduk
4.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	1 unit	300 jt	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	1 unit	300 jt	<b>Kami drop untuk kegiatan lain</b>
5.	Pemeliharaan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	60 paket (30 unit)	20 jt	Pemeliharaan perlengkapan kantor		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	60 paket (30 unit)	20 jt	
3.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Ketersediaan seragam dinas</b>			<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Ketersediaan seragam dinas</b>			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam khusus hari-hari tertentu	50 orang	20jt	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam khusus hari-hari tertentu	50 orang	20jt	Dinas disdukcapil merupakan dinas pelayanan masyarakat

NO.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase SDM yang berkompeten</b>	<b>100%</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase SDM yang berkompeten</b>			
	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan diklat/bimtek	50 orang	20 jt	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan diklat/bimtek	50 orang	25 jt	ADB dan seluruh karyawan/ti dinas
5.	<b>Program peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dn keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>Program peningkatan perencanaan, laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dn keuangan yang disusun tepat waktu</b>			
	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	10 dok	30 jt	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah		Prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	10 dok	30 jt	LPPD, LKJIP, LKPJ, SIPD, SIPP, RENJA, Monev RENJA, TEPR dII
6.	<b>Program Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase penduduk berKTP, Prosentase penduduk ber KK</b>	<b>99% 100%</b>		<b>Program Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase penduduk berKTP, Prosentase penduduk memiliki KK</b>	<b>99% 100%</b>		
	Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan		Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan kk dan KTP-el	3 dok	230 jt	Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan		Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	3 dok	555 jt	Pelayanan penerbitan administrasi kependudukan KK, KTPel dan surat pindah
	Pengelolaan data arsip elektronik dokumen kependudukan		Jumlah data arsip kependudukan	16 ribu dok	185 jt	Pengelolaan data arsip elektronik dokumen kependudukan		Jumlah data arsip kependudukan yang dikelola secara elektronik	16 ribu dok	185 jt	<b>Kami drop dialihkan kegiatan lain</b>
	Pendataan penduduk non permanen		Jumlah pendataan penduduk non permanen	2 kali	60 jt	Pendataan penduduk non permanen		Jumlah pendataan adm kependudukan bagi penduduk non permanen	2 kali	60 jt	<b>Kami drop dialihkan kegiatan lain</b>
7.	<b>Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase penduduk memiliki Akta Kelahiran</b>	<b>75%</b>		<b>Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase penduduk memiliki Akta Kelahiran</b>	<b>75%</b>		
	Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil		Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	19 ribu lembar	185 jt	Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil		Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	19 ribu lembar	185 jt	
	Pengelolaan data arsip elektronik dokumen pencatatan sipil		Jumlah data arsip pencatatan sipil yang di scan	16 ribu lembar	185 jt	Pengelolaan data arsip elektronik dokumen pencatatan sipil		Jumlah data arsip pencatatan sipil yang dikelola secara elektronik	16 ribu lembar	185 jt	
8.	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase Pelayanan Sistem Informasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>		<b>Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Prosentase Pelayanan Sistem Informasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>		

NO.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
						n		n			
	Pengelolaan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan		Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK	19 lokasi	150 jt	Pengelolaan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan		Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK	19 titik	150 jt	
9.	<b>Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan</b>	<b>Kab Mgt</b>	<b>Jumlah buku profil yang dicetak/dibuat ; jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi</b>	<b>100%</b>							
	Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan		Jumlah kepemilikan KIA dan Akta Kematian	1 tahun	100 jt	Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan		Jumlah kepemilikan KIA dan Akta Kematian	1 tahun	150 jt	
	Penyusunan data kependudukan		Jumlah buku profil kependudukan yang dibuat	280 buku	70 jt	Penyusunan data kependudukan		Jumlah buku profil kependudukan yang dibuat	290 buku	80 jt	Disebar di kec/desa/instansi terkait /semua OPD dan lintas instansi yang membutuhkan
	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)		Jumlah sertifikat Standarisasi pelayanan Administrasi Kependudukan	1 sertifikat/dok	60 jt	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan		Jumlah sertifikat Standarisasi pelayanan Administrasi Kependudukan	1 sertifikat/dok	60 jt	Pemeliharaan
	<b>JUMLAH</b>			<b>4.205.000.000</b>							

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rancangan Akhir Renja tahun 2021 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Bappeda Litbang, sehingga Renja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD Tahun 2021

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2021**

**Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Nihil</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 agenda pembangunan nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya adalah Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan dengan Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik.

Berdasarkan rumusan Hasil Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 adalah pemutakhiran DP4 untuk penetapan DPT Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Dan hasil rakornas tahun 2019 di Makasar tujuan utama dari Rakornas ini adalah untuk mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Dukcapil Go Digital.

Selain mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019, Rakornas ini bertujuan pula mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar segera menuntaskan perekaman KTP-el bagi penduduk wajib KTP di seluruh Indonesia serta memantapkan tatakelola pelaksanaan kependudukan dan pencatatan sipil yang membahagiakan masyarakat melalui penggunaan teknologi digital.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien dan negara yang memiliki daya saing telah dicanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

(GISA) dan ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang GISA serta peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencapaian target kinerja tahun 2018.

Untuk melanjutkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan Target Nasional Indikator Kepemilikan Akta Kelahiran dikalangan Anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18 Tahun), yaitu 75% pada tahun 2015, 77,5% pada tahun 2016, 85% pada tahun 2017, 82,5% pada tahun 2018 dan 95% pada tahun 2019, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang perlu disusun untuk meningkatkan cakupan pencatatan sipil khususnya cakupan pencatatan kelahiran dikalangan anak sesuai dengan kebijakan nasional.

Keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemerintah provinsi yaitu mensinkronkan program serta menyamakan persepsi dalam melaksanakan program-program nasional dan target kinerja bidang Administrasi Kependudukan.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah :

#### **Tujuan :**

 Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan;

#### **Sasaran :**

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien
2. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Tujuan sasaran dan Target Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2021**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Prosentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%
			Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100%
			Skor SKM	86%
2.		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit
			Jumlah Pengadaan kendaraan dinas	1 unit
			Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 jenis
			Jumlah pengadaan Perlengkapan kantor	6 unit
			Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	2 gedung
			Jumlah PNS /ADB yang mengikuti pelatihan/Bimtek	50 orang
			Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam khusus hari-hari tertentu	50 seragam
			Jumlah PNS yang mengikuti diklat/bimtek	50 Orang
			prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	100%
			Jumlah Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	3 jenis (KK, KTP-el dan KIA)
			Jumlah Data arsip kependudukan	16.000 dokumen
			Jumlah pendataan penduduk non permanen	2 dokumen
			Jumlah Pelayanan dan penerbitan dokumen capil	7 jenis
			Jumlah Data arsip capil	16.000 dokumen
			Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK	12 bulan
			Jumlah kerjasama dengan OPD dan lintas OPD ; Jumlah money tertib	1 dok;72 kali

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5
			adminduk kedesa	
			Jumlah buku profil kependudukan yang disusun	570 eks; 280 eks
			Jumlah sertifikat standarisasi pelayanan adminduk (ISO)	1 Jenis

### Program dan Kegiatan

Dengan memperhatikan pada :

- Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2019;
- Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2019;
- Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2020;
- Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan;
- Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta
- isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2019 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

Maka Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan perjalanan dinas aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase pelaksanaan pelaksana pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
			Skor SKM	80%	85%	86,05%	86,10%	86,10%
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>efektif dan efisien</b>						
			Pengadaan Perlengkapan kantor	15 unit	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit
			Pemeliharaan perlengkapan kantor	12 jenis	10 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis
			Pemeliharaan gedung kantor	8 gedung	1 gedung	2 gedung	1 gedung	1 gedung
			Pengadaan kendaraan dinas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			PNS /ADB yang mengikuti pelatihan/Bimtek	31 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
			Pengadaan kendaraan dinas	-	1 unit	-	1 unit	-
			Pegawai yang mendapatkan seragam hari-hari tertentu	-	50 seragam	-	-	-
		<b>Meningkatnya tertib dokumen administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi</b>	Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
			Data arsip kependudukan	16.000 dok	16.000 dok	16.000 dok	16.000 dok	16.000 dok
			Pendataan penduduk non permanen	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
			Pelayanan dan penerbitan dokumen capil	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis
			Data arsip dokumen capil	18.000 dok	16.000 dok	16.000 dok	16.000 dok	16.000 dok
			Pemeliharaan jaringan SIAK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
			Kerjasama dengan OPD/lintas OPD dan monev tertib adminduk kedesa	1dok; 72 kali	1dok; 72 kali	1dok; 72 kali	1dok; 72 kali	1dok; 72 kali
			buku profil kependudukan	280 buku	280 buku	280 buku	280 buku	280 buku
			sertifikat ISO	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2021 sebagai berikut:

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Administrasi Umum
  - Penyediaan Jasa Komunikasi
  - Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - Pengadaan Perlengkapan Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### **II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan
  - Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
  - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

#### **III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

#### **IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
  - Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
  - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
  - Sosialisasi Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

#### **V. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**

1. Penyusunan Profil Kependudukan
  - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berikut Program dan Kegiatan Tahun rencana 2021 beserta target capaian kinerja dan pagu indikatifnya :

Tabel 3.3

**Program dan Kegiatan SKPD Tahun  
2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2									
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2	06								
	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	06	01							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur; ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran; skor SKM							
2	06	01	111						
	Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	Kab Magetan	100%	200.000.000	APBD	Rapat dan koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	100%	200.000.000

2	06	01	112	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	Kab Magetan	100%	650.000.000	APBD	Belanja rutin, tenaga non PNS	100%	650.000.000
2	06	01	022	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen SKM	Kab Magetan	85%	25.000.000	APBD	1 dokumen	85%	30.000.000
2	06	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi</b>							
2	06	02	111	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab Magetan	16 unit	150.000.000	APBD		16 unit	150.000.000
2	06	02	112	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kab Magetan	18 unit	650.000.000	APBD		18 unit	650.000.000
2	06	02	113	Rehabilitasi /Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pembangunan /pemeliharaan dan rehab gedung kantor	Kab Magetan	1 kegiatan	900.000.000	APBD		2 kegiatan	1.000.000.000
2	06	02	114	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	Kab Magetan	1 unit	300.000.000	APBD	Tahun 2019 drop dialihkan kegiatan lain	-	-
2	06	02	115	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Kab Magetan	60 paket (30 unit)	20.000.000	APBD		12 paket (30 unit)	30.000.000
2	06	03		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Ketersediaan seragam dinas</b>							

2	06	03	121	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam khusus hari-hari tertentu	Kab Magetan	50 orang	20.000.000	APBD	Pakaian khusus	0	0
2	06	04		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase SDM yang berkompeten</b>							
2	06	04	131	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan /bimtek	Kab Magetan	50 orang	35.000.000	APBD	ADB dan semua karyawan/ti dinas	50 orang	35.000.000
2	06	05		<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu</b>		100%					
2	06	05	141	Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Kab Magetan	10 dokumen	30.000.000	APBD	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	10 dokumen	30.000.000
2	06	06		<b>Program Pelayanan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Prosentase penduduk ber-KTP, prosentase penduduk ber KK</b>		99% 50%					
2	06	06	111	Pelayanan dan penerbitan Dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan KK dan KTP-el	Kab Magetan	3 dokumen	230.000.000	APBD	Pelayanan penerbitan administrasi kependudukan KK, KTP-el dan surat pindah	3 dokumen	230.000.000
2	06	07	112	Pengelolaan data arsip elektronik dokumen kependudukan	Jumlah data arsip kependudukan	Kab Magetan	16.000 lbr	185.000.000	APBD	Drop dialihkan kegiatan lain	16.000 lbr	190.000.000
2	06	07	113	Pendataan penduduk non permanen	Jumlah pendataan penduduk non permanen	Kab Magetan	2 kali	50.000.000	APBD		2 kali	60.000.000

2	06	08		<b>Program Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil</b>	<b>Prosentase penerbitan dokumen capil</b>		<b>99,50%</b>					
2	06	08	121	Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah penerbitan dokumen catatan sipil	Kab Magetan	19.000 lembar	185.000.000	APBD		19.000 lembar	190.000.000
2	06	08	122	Pengelolaan data arsip elektronik dokumen pencatatan sipil	Jumlah data arsip capil	Kab Magetan	16.000 berkas	185.000.000	APBD		16.000 berkas	185.000.000
2	06	09		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Prosentase pelayanan SIAK</b>		<b>100%</b>					
2	06	09	141	Pengelolaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK	Kab Magetan	19 lokasi	150.000.000	APBD		19 lokasi	150.000.000
2	06	10		<b>Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan</b>	<b>Jumlah buku profilyang dibuat; jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi</b>							
2	06	10	151	Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan	Jumlah kepemilikan KIA dan Akta Kematian	Kab Magetan	1 tahun	100.000.000	APBD		1 tahun	100.000.000
2	06	10	002	Penyusunan data kependudukan	Jumlah buku profil yang dibuat	Kab Magetan	280 buku	70.000.000	APBD		280 buku	70.000.000

2	06	10	003	Standarisasi Pelayanan Administrasi kependudukan (ISO)	Jumlah sertifikat Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	Kab Magetan	1 sertifikat /dokumen	60.000.000	APBD	Pemeliharaan	1 sertifikat /dokumen	150.000.000
				<b>Jumlah</b>				<b>3.205.000.000</b>				<b>4.105.000.000</b>

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.

Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb).

Kolom (9) diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom(10) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

## **BAB V PENUTUP**

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran rancangan akhir Rencana Kerja 2021 yang digunakan sebagai pedoman dan dokumen rencana kinerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlu adanya penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan. Adapun maksud disusunnya rancangan awal Renja, sebagai berikut :

- 1) Rankhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- 2) Rankhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran tahun 2021;
- 3) Sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Sebagai tindak lanjut dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetap memprioritaskan untuk pelayanan kepada masyarakat yang didukung anggaran yang ada.

Semoga penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berguna serta terukur sehingga bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai unit pelayanan Dokumen Kependudukan.

Magetan, 3 Agustus 2020

**KEPALA DINAS**

**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Drs. HERMAWAN, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP.19660320 198602 1 003





**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN

Tahun Anggaran : 2014

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, Akta Capil, dan Surat Pindah	-KK :1 paket -KTP : - -Akta Capil : 1paket -Surat pindah:1th
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase gedung arsip yang dibangun selama 1th</li> <li>- Prosentase peralatan kantor yang dibeli selama 1th</li> <li>- Prosentase gedung kantor dan tempat pelayanan yang telah diperbaiki dalam 1th</li> <li>- Prosentase BBM dan suku cadang yang dibeli dalam 1 th</li> <li>- Prosentase komputer dan printer yang diservis dalam 1 th</li> </ul>	<p style="text-align: center;">100%</p>
3. Tercapainya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentse penduduk yang memiliki akta kelahiran usia antara 0-18 th</li> <li>- Pembuatan buku profil</li> <li>- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan</li> <li>- Prosentase penerbitan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">500 buku</p> <p style="text-align: center;">542 org</p> <p style="text-align: center;">100%</p>

	KK, KTP, Akta Capil dan Surat Pindah - Prosentase pengadaan arsip elektronik data kependudukan	100%
--	---	------

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIIL**

**Drs. HERMAWAN, MSi**  
Pembina Tk.1  
NIP.19660320 198602 1 003









**LAMPIRAN REVIEW RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

NO	OPD	Keterangan	Tindak Lanjut OPD
1.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan	Terdapat ketidak sesuaian Renja/PD dengan RKPD yaitu : 1. Bab 1 tentang landasan hukum penyusunan (halaman 2) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tidak sesuai dengan RKPD Bab 1(hal 10)	1. Landasan hukum pada Renja PD sudah disesuaikan dengan RKPD namun ada penambahan peraturan yang langsung mengamanatkan (Hal 2)
		2. Bab II tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (hal 6) belum memasukkan hasil monev dari tribulan 1 sampai dengan 4	2. Evaluasi pelaksanaan Renja PD untuk hasil monev Renja kami lampirkan hanya monev Renja tribulan 4 karena otomatis nampak realisasi maupun capaian Program /Kegiatan dimasing-masing tribulan 1,2,3 dan 4


  
**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Drs. HERMAWAN, MSi  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19660320 198602 1 003